

PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SLTP KETERAMPILAN

SUPRIYOKO

Taman Siswa

ABSTRACT. Many junior secondary dropouts and many junior secondary graduates who do not go to senior secondary school create a lot of young people who are unprepared to join the work force. Yet it is against the regulation to establish junior vocational school. The problem is solved by establishing skill oriented junior secondary school. Though still semi-skilled their graduates could easily join the work force. There are minor legal problem for the establishment of such kind of school, but this problem rests more in legal interpretation rather than their material. Some additional ministerial decrees could solve this legal problem.

Pengantar

Salah satu isu pendidikan yang tengah berkembang di masyarakat sekarang ini adalah isu tentang penyelenggaraan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Keterampilan pada beberapa sekolah yang ditunjuk. Tidak seluruh sekolah ditunjuk untuk menyelenggarakan SLTP Keterampilan. Tugas itu hanya diberikan kepada beberapa sekolah yang dipandang memang siap untuk menyelenggarakannya serta strategis dan relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat di sekitarnya.

Adapun yang dimaksudkan dengan SLTP Keterampilan bukanlah sekolah yang berdiri sendiri dalam arti merupakan satuan pendidikan baru. Namun yang dimaksudkan dengan SLTP Keterampilan adalah sekolah atau SLTP "biasa" yang di dalamnya dikembangkan program keterampilan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 13 yang dimaksud itu menyatakan bahwa pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan

sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta menyiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah (ayat 1).

Dengan telah diberlakukannya UU Nomor 2/1989 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/1990 tentang Pendidikan Dasar maka SLTP merupakan bagian dari pendidikan dasar. Ditegaskan di dalam Pasal 1 PP Nomor 28/1990 bahwa pendidikan dasar merupakan pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar (SD) serta tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau satuan pendidikan yang sederajat dengan itu (ayat 1).

Dasar Pertimbangan

Salah satu pertimbangan untuk diselenggarakannya SLTP Keterampilan adalah banyaknya siswa SLTP yang putus sekolah (*drop-out*) dan banyaknya lulusan SLTP yang tidak melanjutkan studinya ke sekolah menengah. Secara kuantitatif angka untuk dua kriteria ini terletak di sekitar 900.000 anak setiap tahun; misalnya pada tahun 1991 terdapat 455.000 siswa putus sekolah SLTP serta 454.000 lulusan SLTP yang tidak melanjutkan studi ke sekolah menengah (apabila dijumlah mereka mencapai 909.000 anak). Tingginya angka putus sekolah dan lulusan sekolah yang tidak melanjutkan studi merupakan masalah yang cukup serius. Para putus sekolah dan lulusan sekolah yang tidak melanjutkan studi akan menjadi beban pembangunan dan beban bagi dirinya sendiri karena untuk dapat terjun langsung ke masyarakat, mereka belum memiliki keterampilan serta kesiapan yang memadai. Karena itu akhirnya mereka menjadi tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terampil (*unskilled worker*) yang sulit dikembangkan kualifikasinya.

Penyelenggaraan SLTP Keterampilan lebih ditujukan kepada siswa yang berpotensi untuk putus sekolah dan berpotensi untuk tidak melanjutkan sekolah. Mereka akan diberikan keterampilan dasar agar supaya mereka lebih siap terjun ke masyarakat dengan bekal keterampilan dasar yang diperolehnya dari sekolah. Di samping pertimbangan utama tersebut sebenarnya masih ada pertimbangan lain. Penyelenggaraan SLTP Keterampilan juga didasarkan kepada berbagai temuan empirik yang mendukung gagasan tersebut, antara lain sebagai berikut.

1. Hasil penelitian Karl Frey, cs (1982) menyatakan bahwa tamatan SD,

tamatan SLTP, dan putus sekolah SLTA merupakan masalah utama yang harus diatasi. Dengan usia yang masih muda serta keterbatasan BLK untuk melayani pelatihan, mereka ini umumnya masih harus menunggu lama, sampai enam tahun, baru mendapat kesempatan pelatihan untuk kesiapan kerja.

2. Hasil studi Balitbang dan Dikmenjur Depdikbud (1991) menyatakan bahwa sebanyak 93,2% dari 483 perusahaan (yang terdapat di dalam studi) lebih menyenangi tamatan SMTP Kejuruan (ST dan SKKP) daripada lulusan SMTP Umum (SMP) untuk dipekerjakan di perusahaannya; hanya 6,8% yang lebih menyenangi lulusan SMTP Umum (SMP) daripada SMTP Kejuruan (ST dan SKKP).
3. Hasil studi Balitbang dan Dikmenjur Depdikbud (1991) tersebut di atas juga mendapatkan bukti empirik bahwa 76% dari 483 perusahaan (yang terdapat di dalam studi) tersebut masih membutuhkan lulusan SMTP Kejuruan (ST dan SKKP) untuk sekarang dan untuk masa-masa yang akan datang.

Hasil-hasil penelitian tersebut dijadikan pertimbangan lain untuk mendukung diselenggarakannya SLTP Keterampilan. Sebenarnya masih ada beberapa pertimbangan yang lainnya lagi, misalnya, hasil pengamatan yang menunjukkan bahwa sekitar 80% tenaga kerja yang diperlukan oleh lapangan kerja sekarang ini adalah tenaga kerja berkualifikasi setengah terampil yang ekuivalen dengan lulusan SMTP Kejuruan (dulu) dan tenaga kerja yang berkualifikasi terampil yang ekuivalen dengan lulusan SMTA Kejuruan (dulu). Banyaknya orang tua yang tidak sanggup membiayai studi anaknya selepas SLTP juga merupakan pertimbangan lain.

Konsep Kelembagaan

Penyelenggaraan SLTP Keterampilan merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas serta produktivitas tenaga kerja lulusan sekolah. Tanpa memiliki keterampilan maka lulusan SLTP (umum) merupakan tenaga kerja yang berkualifikasi rendah, tidak terampil dan tidak produktif. Namun dengan bekal keterampilan dasar maka lulusan SLTP akan menjadi tenaga kerja berkualifikasi setengah terampil dan lebih produktif dan, di damping itu, mereka lebih siap untuk dikembangkan.

Pemberian program-program keterampilan pada SLTP Keterampilan diorientasikan kepada kebutuhan lingkungan dan disesuaikan dengan tingkat

kemampuan penguasaan anak didik pada usia SLTP. Sedangkan beberapa jenis program keterampilan yang akan diberikan kepada anak didik pada SLTP Keterampilan, antara lain, adalah sebagai berikut.

1. Keterampilan Bangunan
2. Keterampilan Pengerjaan Logam
3. Keterampilan Listrik dan Elektronika
4. Keterampilan Otomotif
5. Keterampilan Pertanian dan Pengelolaan Hasil Pertanian
6. Keterampilan Kerajinan
7. Keterampilan Kerumahtanggaan dan Kepariwisataaan
8. Keterampilan Niaga

Jenis-jenis keterampilan tersebut masih terbuka untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lingkungannya masing-masing; misalnya pada daerah tertentu diperlukan keterampilan yang sangat spesifik (*local specific*) untuk mendukung *home-industry* yang sedang berkembang, maka dalam hal ini, di tempat itu dapat diselenggarakan SLTP Keterampilan dengan program-program yang sangat spesifik tersebut. Penentuan program-program keterampilan yang akan dilaksanakan pada SLTP tertentu (tidak semua SLTP) lebih didasarkan pada potensi wilayah dan prospek pasar kerja pada wilayah itu. Di samping itu penentuan program ini juga didasarkan pada tersedianya sumber daya pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan program studi bersangkutan, antara lain, hal-hal yang menyangkut bangunan dan peralatan, guru yang relevan, serta dukungan masyarakat sekitar.

Oleh karena SLTP Keterampilan bukan merupakan satuan pendidikan baru, namanya pun sebenarnya tetap SLTP. Di dalamnya hanya disajikan program-program keterampilan tertentu, sehingga hak dan kewajiban siswa SLTP Keterampilan adalah sama dengan siswa SLTP (biasa). SLTP Keterampilan berhak mengikuti ujian dan mendapatkan tanda kelulusan sebagaimana halnya dengan siswa SLTP (biasa).

Besarnya alokasi satuan waktu dalam kurikulum untuk menyajikan program-program bekal keterampilan adalah sekitar 16 jam pelajaran setiap minggu. Dengan alokasi 16 jam pelajaran (masing-masing 45 menit) setiap minggunya maka dalam tiga tahun akan diperoleh jumlah sekitar 1.600 jam pelajaran, atau sebanyak 1.200 jam efektif (masing-masing 60 menit). Jumlah ini sesungguhnya masih jauh dari optimal, dan belum memadai untuk menghantarkan lulusan menjadi tenaga kerja berkualifikasi terampil (*skilled worker*); oleh karenanya, kalau terjun di lapangan kerja, lulusan SLTP Keterampilan akan berkualifikasi setengah terampil (*semi skilled worker*). Meski

demikian lulusan SLTP Keterampilan menjadi lebih siap untuk dikembangkan.

Berkaitan dengan konsep "*Link and Match*" (kesinambungan dan kesepadanan) yang dikembangkan oleh Dekdikbud maka penyelenggaraan SLTP Keterampilan sangat relevan di dalam penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Di dalam hal ini terdapat interaksi yang saling mendukung di antara pihak sekolah dengan pihak masyarakat sekitar, khususnya masyarakat industri/perusahaan.

Dasar Hukum

Salah satu permasalahan pada penyelenggaraan SLTP Keterampilan adalah dasar hukum (*basic legality*). Dari sisi legalitas maka penyelenggaraan SLTP Keterampilan kurang mempunyai dasar hukum yang kokoh, meskipun bukan berarti tidak memiliki dasar hukum sama sekali. Keadaan ini lebih disebabkan oleh adanya berbagai interpretasi operasional yang antagonistik dan ambivalentif dari berbagai ketentuan yang ada, terutama ketentuan di dalam pasal-pasal dan ayat-ayat pada UU Nomor 2/1989 dan PP Nomor 28/1990.

Dengan mengacu pada Pasal 13 UU Nomor 2/1989 yang menyatakan bahwa pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta menyiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah (*ayat 1*), maka kemungkinan penyelenggaraan SLTP Keterampilan memberikan dukungan kuat atas diselenggarakannya SLTP Keterampilan yang memberikan bekal keterampilan bagi lulusannya.

Meskipun demikian pada sisi lain ternyata ada beberapa pasal dan ayat yang kurang memberi dukungan secara optimal. Pasal 1 PP Nomor 28/1990 secara tegas menyebutkan bahwa pendidikan dasar merupakan pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat (*ayat 1*). Dari ketentuan ini bisa disimpulkan bahwa pendidikan dasar, SD dan SLTP, termasuk dalam kategori pendidikan umum. Dengan demikian kalau SLTP Keterampilan merupakan sekolah atau pendidikan kejuruan, maka jelas mereka menyalahi ketentuan dalam UU maupun PP.

Mengingat bahwa SLTP Keterampilan bukan merupakan satuan pendidikan yang tersendiri maka sulit mengklasifikasikan SLTP Keterampilan se-

bagai sekolah kejuruan Tetapi mengingat bahwa SLTP Keterampilan menyiapkan lulusannya untuk terjun langsung ke masyarakat dengan bekal keterampilan yang didapat dari sekolah, maka kiranya sulit untuk mengklasifikasi SLTP Keterampilan sebagai sekolah umum.

Dari disain kurikulum yang mengalokasi sekitar 16 jam (dari sekitar 40 jam) per minggu untuk penyajian program-program keterampilan maka SLTP Keterampilan sekalipun tidak tepat diklasifikasikan sebagai sekolah kejuruan, maka setidaknya-tidaknya merupakan SLTP yang "berwarnakan" kejuruan. "Warna" kejuruan inilah yang memperlemah dasar hukum SLTP Keterampilan.

Sementara itu Pasal 3 PP Nomor 28/1990 secara jelas juga menyebut bahwa pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar (bukan keterampilan dasar) bagi peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Kalau diacu kalimat "mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah," maka tujuan SLTP Keterampilan jelas kurang relevan dengan ketentuan yang ada. Tetapi kalau diacu pada kalimat "mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat," maka rasanya tujuan SLTP Keterampilan memang dapat dimaklumi.

Dari uraian tersebut tergambarkan bahwa dilihat dari segi klasifikasi sekolah serta tujuan pendidikan, maka penyelenggaraan SLTP Keterampilan masih perlu didukung dengan berbagai ketentuan hukum yang melandasinya; misalnya SK Mendikbud, SK Bersama Mendikbud-Menaker, dan sebagainya. Berbagai ketentuan ini sekaligus akan merupakan klasifikasi interpretatif terhadap pasal-pasal dan ayat-ayat UU dan PP yang berkonotasi antagonistik.

Kesiapan Lapangan

Kesuksesan penyelenggaraan SLTP Keterampilan sangat tergantung kepada kesiapan lapangan; baik kesiapan mental calon siswanya, kesiapan keterampilan gurunya, kesiapan fisik laboratorium dan sarana praktikumnya, maupun yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan "iklim keterampilan-nya".

Mengenai penyelenggaraan SLTP Keterampilan yang memberi bekal keterampilan dasar bagi siswa untuk terjun ke masyarakat, sebenarnya sudah ada program pembandingan yang pernah menjadi keputusan politik Depdikbud, yaitu penyelenggaraan Program B di SMA yang tertuang di dalam Kurikulum 1984. Gagasan pemberian bekal keterampilan bagi siswa sekolah umum

sebenarnya pernah digariskan dalam Kurikulum 1984 SMA, yaitu diselenggarakan berbagai program keterampilan melalui jalur B.

Seperti diketahui, ketika Depdikbud mengembangkan Kurikulum 1984 SMA yang dipakai sekarang ini (ketika itu untuk menggantikan Kurikulum 1975 SMA) muncullah gagasan untuk memberi bekal kepada lulusan SMA yang berpotensi tidak melanjutkan studi ke perguruan tinggi, meskipun di dalam formasi serta materi kurikulumnya, mereka ini tetap disiapkan untuk melanjutkan studi.

Atas munculnya gagasan tersebut di atas, maka pada akhirnya, Kurikulum 1984 SMA dipisah ke dalam dua jalur; masing-masing adalah jalur A yang berisikan program-program A (A1, A2, A3, A4, dan A5) yang lebih mempersiapkan lulusan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, dan jalur B yang berisikan program-program B (B1, B2, B3, B4 dan B5) yang lebih mempersiapkan lulusan untuk terjun langsung ke masyarakat (lapangan kerja).

Tegasnya: SMA-A berisikan program A1, A2, A3, A4 dan A5 yang memberikan bekal ilmu pengetahuan supaya lulusannya dapat melanjutkan studi ke perguruan tinggi, dan sementara itu SMA-B berisikan program B1, B2, B3, B4 dan B5, yang memberikan bekal keterampilan supaya lulusannya dapat terjun langsung ke lapangan kerja.

Kedua jalur tersebut ternyata tidak seluruhnya dapat berkembang di lapangan. Ternyata hanya SMA-A saja yang berjalan sampai sekarang, dan itu pun tidak mencakup seluruh program (misalnya program A5 terpaksa macet). Sementara itu, SMA-B tidak dapat dilaksanakan meskipun sudah berkali-kali diupayakan. Tidak satupun program B yang dapat dilaksanakan di lapangan. Tidak dapat dilaksanakannya program B di lapangan ini ternyata lebih disebabkan oleh ketidaksiapan unsur lapangan; mental calon siswanya belum terbentuk, keterampilan gurunya tidak layak, laboratorium dan sarana praktikumnya tidak memadai, sistem manajemen persekolahannya kurang mendukung, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa "iklim keterampilannya" belum tumbuh subur.

Belajar dari referensi empirik tersebut di atas maka untuk dapat menyelenggarakan SLTP Keterampilan dengan sukses, kesiapan lapangan menjadi persyaratan yang tidak bisa ditawar lagi. Dalam hal ini keterampilan gurunya harus disiapkan, laboratorium dan sarana praktek disiapkan, sistem manajemen persekolahannya disiapkan, dan "iklim keterampilannya" ditumbuhkan. Dilihat dari berbagai aspek kesiapan tersebut di atas kiranya sekolah-sekolah yang dulunya merupakan SMTP Kejuruan (ST, SMEP, SKKP, dan sebagainya) sangat berpotensi untuk menjadi SLTP Keterampilan; misalnya yang dulunya ST menjadi SLTP Keterampilan di bidang bangunan,

pengerjaan logam, otomotif, serta listrik dan elektronika, yang dulunya SKKP menjadi SLTP Keterampilan di bidang kerumahtanggaan, yang dulunya SMEP menjadi SLTP Keterampilan di bidang niaga, dan sebagainya.

Keseimpulan

Dari uraian tersebut di atas kiranya bisa ditarik kesimpulan yang ,secara sistematis, bisa diidentifikasi ke dalam beberapa butir sebagai berikut.

1. Pada dasarnya SLTP Keterampilan bukan merupakan SLTP yang berdiri sendiri dalam arti kata merupakan satuan pendidikan yang baru, akan tetapi merupakan SLTP yang di dalamnya disajikan program-program keterampilan tertentu sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

2. Sebagai dasar pertimbangan utama diselenggarakannya SLTP Keterampilan ialah terdapatnya kenyataan tentang tingginya angka putus sekolah di SLTP serta tingginya angka lulusan SLTP yang tidak melanjutkan studi ke sekolah menengah; di samping adanya pertimbangan-pertimbangan lain yang mendukungnya.

3. Penyelenggaraan SLTP Keterampilan lebih ditujukan kepada siswa yang berpotensi untuk putus sekolah serta siswa yang selepas SLTP berpotensi tidak melanjutkan studi ke sekolah menengah, sehingga dengan bekal keterampilan yang diperoleh dari sekolah, mereka akan lebih siap untuk terjun ke masyarakat.

4. Dasar hukum penyelenggaraan SLTP Keterampilan belum menunjukkan titik yang optimal. Oleh karena itu masih perlu diciptakannya ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan baru yang bisa memperkuatnya; misalnya saja, melalui SK Mendikbud, SK Bersama antara Mendikbud-Menaker, dan sebagainya.

5. Keberhasilan penyelenggaraan SLTP Keterampilan sangat tergantung pada kesiapan lapangan; baik yang menyangkut mental siswa, kesiapan guru, ketersediaan fisik laboratorium dan/atau sarana praktek, sistem manajemen sekolah, dan yang tak kalah pentingnya adalah "iklim keterampilan".

Daftar Pustaka

Holland, J.L. *Making Vocational Choices*. New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1985.

- Pakpahan, J. "Program Pendidikan Keterampilan pada SLTP." Makalah Seminar, Majelis Luhur Tamansiswa, Yogyakarta, 3 Juli 1993.
- Sperber, Brenda. *Predicting and Understanding Women's Occupational Orientations*. Boston: Addison-Wishley Publishing Company, 1976.
- Supriyoko. "Aspirasi Studi Siswa SMP : Studi Kasus pada SMP Negeri Sengangsari Yogyakarta." Laporan Penelitian, LPP Puta Mataram, Yogyakarta, 1986.
- Supriyoko. "Menjadikan STM sebagai Pusat Pengembangan Budaya Profesional" Makalah Seminar. PPPG Teknologi, Bandung, 17 Juni 1992
- Supriyoko. "Minat Siswa terhadap Sekolah Kejuruan: Studi tentang Pengaruh Faktor-Faktor Sikap, Dukungan Teman Sebaya serta Harapan Orang Tua pada Siswa Sekolah Menengah Umum Pertama (SMP) di Daerah Istimewa Yogyakarta." Disertasi. FPS IKIP Jakarta, Jakarta 1989.
- Supriyoko. "Penyelenggaraan SLTP Keterampilan." *Suara Pembaharuan*. Jakarta: 3 Juli 1993
- Supriyoko. "SLTP Keterampilan Berwarna Kejuruan." *Bali Post*. Denpasar, 31 Mei 1993.
- UNESCO, *Technical Teacher Education Course*. Paris: Unesco's Experimental Repro-Unit, 1978

Pengarang

SUPRIYOKO, Dr. adalah staf pengajar di Taman Siswa, Yogyakarta